

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI DESA WAJOMARA, KECAMATAN AESESA SELATAN,  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH:**

**METODIUS MASA**  
**NIM.217130057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2021**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI  
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI DESA WAJOMARA KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2021



Disusun dan diajukan oleh

**METODIUS MASA**  
NIM.217130057

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Skripsi  
Mataram, Agustus 2021

Pembimbing I

  
**Drs. Amil, M.M.**  
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

  
**Hidayatullah, S. IP., M. IP.**  
NIDN. 0809038902

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan  
  
**Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP.**  
NIDN.0816057902

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA**  
**DESA DI DESA WAJOMARA, KECAMATAN AESESA SELATAN,**  
**KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021**

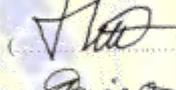
Oleh:

**METODIUS MASA**  
217130057

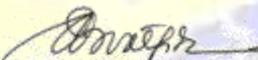
**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan didepan penguji Skripsi Pada Tanggal 16 Agustus 2021 dan  
dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji**

- |  |    |  |
|--|----|--|
| 1. <u>Drs. Amil, M.M</u><br>NIDN.08311262204             | PU | (  )  |
| 2. <u>Hidayatullah, S.IP., M.IP</u><br>NIDN.0809038902   | PP | (  ) |
| 3. <u>Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP</u><br>NIDN.0816057902 | PN | (  ) |

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

  
**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN.0816057902

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN.0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa;

Nama : Metodius Masa

NIM : 217130057

Alamat : FLORES NTT

Memang benar skripsi yang berjudul "*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Tahun 2021*"

Adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan sebagai daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat atas dasar pemikiran sendiri dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Me  2021  
**METODIUS MASA**  
217130057



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Metadius Masa  
NIM : 217130057  
Tempat/Tgl Lahir : Ecouwara, 14 Juni 1997  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPol  
No. Hp/Email : 089359117801 / metadiusmasa@gmail.com  
Judul Penelitian : -

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
DESA WAJOMARA, KECAMATAN BESESA, SELATAN, KABUPATEN NAGEKHO  
TAHUN 2021

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.* 67%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram  
Pada tanggal : 08 September 2021

Penulis  
METADIUS MASA



NIM. 217130057

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.  
NIDN. 0802048904



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Metodius Masa  
 NIM : 217130057  
 Tempat/Tgl Lahir : Boangsa, 14 Juni, 1997  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp/Email : 089.359.117601 / metodiusmasa@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WAJOMARA KECAMATAN BESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
 Pada tanggal : 09 September 2021

Penulis  
METODIUS MASA



NIM. 217130057

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos, M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTO

*Amanah Merupakan Tanggung Jawab Yang Harus Di Perjuangkan*

### Perjuangan

**Merupakan Wujud Nyata Perjalanan Kehidupan Dan Hidup Mulai Ketika Kita Meninggalkan Zona Nyaman Serta Berusaha Memahami Apa Arti Kehidupan Dan Berkontri Busi Kepada Sesama Sebagai Wujud Nyata Berjuang Dan Terlibat Dengan Selalu Memohon Campur Tangan Tuhan Yang Maha.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang tidak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul *“Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Tahun 2021”* suatu hal yang sangat mustahil kalau dalam proses penyelesaian skripsi ini tanpa campur tangan bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik itu secara material maupun moril, leh karena itu sudah sepatutnyalah penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, M.M Selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Hidayatullah, S.Ip., M.Ip selaku dosen pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Untuk orang tua tercinta Mama Petronela Dhibi yang senantiasa tabah dan setia dalam mendukung saya sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan studi saya.
7. Bapak Hubertus Kota, S.Pd, Mama Grasiana Tia, Mama Veronika Somu, S.Si, Ibu Servia Dea, S.Pd, Om Silvester Sape, Om Gaspar Lawa, Om Fransiskus Dapa, Kk Paulinus Masa Sato, Kk Sergius Goru, Kk Agustna Tato yang senantiasa tabah dan setia dalam mendukung saya sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan studi saya.

8. Saudara saudari saya dipaguyuban Generasi Muda Asal Nagekeo Ngada – Mataram (GEMANADA) Ocan, Racun, Rian U, Engki, Elton, Rian D, Dovan, Nanda, Rasta, Rangga, Arfin, Anita, Ino, Lion, Urton, Riki, Rinto, Ros, Jeni, Roslin, Ita, In, Restin, Santi, Tin, Astin N, Astin L, Febry, Rein, Iron, Nastin.
9. Kepada teman-teman, rekan-rekan, sahabat, keluarga yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik berupa materi, penyemangat, support-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini dapat terwujud. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, penulis ucapkan terima kasih.

Mataram, 13 Agustus 2021

Penulis



Melodius Masa  
217130057

**“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA  
DI DESA WAJOMARA, KECAMATAN AESESA SELATAN,  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021”**

**METODIUS MASA**

**ABSTRAK**

Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta memiliki suara terbanyak. Di Desa Wajomara rata-rata masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik (Ramlan Surabakti 2008), Tipologi Partisipasi Politik (A. Rahman 2007), dan Bentuk Partisipasi Politik (Cholisin 2007), sebagai pisau analisis penelitian dan sebagai instrumen untuk melakukan pengkajian secara mendalam untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Desa Wajomara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Kesimpulan penelitian ini adalah Masyarakat Desa Wajomara memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Wajomara adalah faktor mobilisasi kaum intelektual yang fokus pada penawaran konsep dan gagasan baru bagi kemajuan Desa Wajomara tersebut.

**Kata Kunci : Partisipasi, Pemilihan, Politik.**

**COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN VILLAGE HEADS ELECTION  
IN WAJOMARA VILLAGE, SOUTH ASESERA, NAGEKEO DISTRICT IN 2021**

**METODIUS MASA**

**ABSTRACT**

The village government is a subsystem of the government administration system, and it is responsible for regulating and managing the community's interests. The village head is directly elected by the villagers from candidates who meet the standards and receive the most votes in the village government system. The typical community in Wajomara Village takes part in the election of the village chief. There are a variety of elements that influence political engagement.

The theory of political participation (Ramlan Surabakti 2008), the Typology of Political Participation (A. Rahman 2007), and the Forms of Political Participation (Cholisin 2007) are used in this study as a research analysis and an instrument to determine the political participation of the Wajomara Village community. The methodologies used in this study are descriptive qualitative research approaches. The descriptive analysis approach is used to create a systematic, factual, and accurate account of the facts, characteristics, and relationships between the phenomena under study. A descriptive analysis method is one that uses data or samples acquired in their current state to explain or provide an overview of the thing under study.

This study concluded that the Wajomara Village community has a pretty high level of political participation. The mobilizing factor of intellectuals who focus on presenting new concepts and ideas for the advancement of Wajomara Village is one of the elements that affect the level of community participation in Wajomara Village.

**Keywords:** *Participation, Election, Politics*



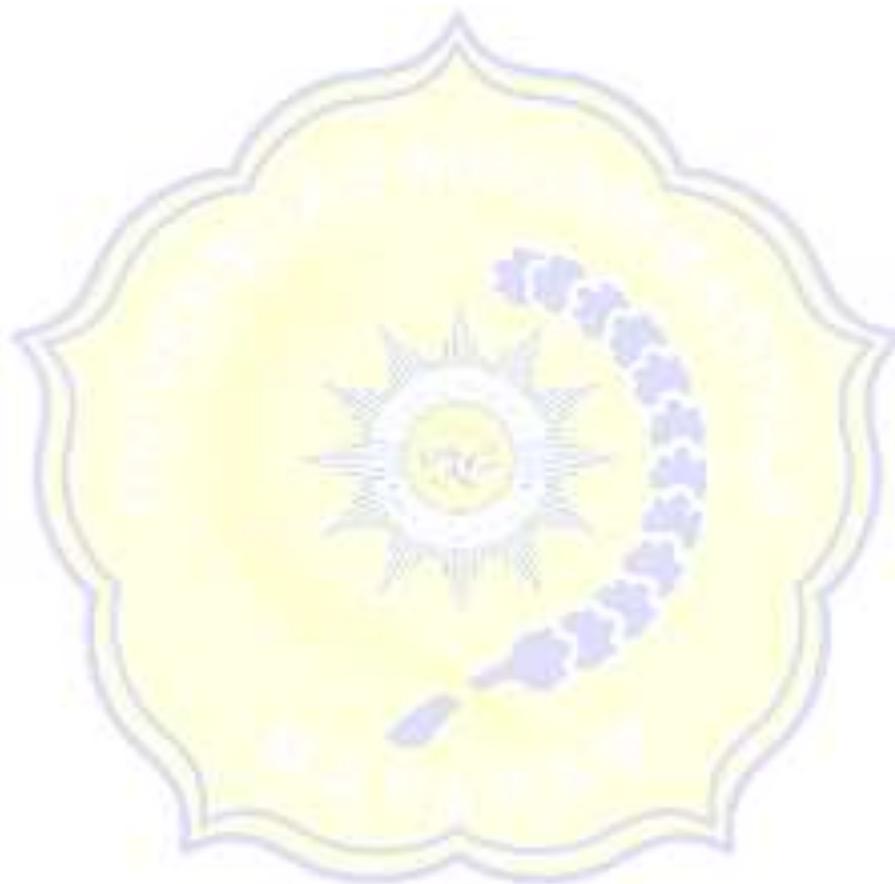
## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAU PUSTAKA.....	9
2.1 Telaah Pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 Pengertian Partisipasi Politik.....	18

2.2.2 Faktor-Faktor Partisipasi Politik.....	21
2.2.3 Tipologi Partisipasi Politik.....	24
2.2.4 Bentuk Partisipasi Politik.....	27
2.2.5 Partisipasi Politik Konvensional.....	30
2.2.6 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).....	32
2.2.7 Syarat-Syarat Yang Dapat Dipilih Menjadi Kepala Desa.....	38
2.2.8 Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	41
2.3 Kerangka Berpikir.....	45
2.3.1 Definisi Konseptual.....	45
2.3.2 Definisi Operasional.....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Fokus Penelitian.....	50
3.4 Metode Dan Dasar Penelitian.....	50
3.5 Teknik Penentuan Informen.....	51
3.6 Sumber Data.....	51
3.6.1 Data Primer.....	51
3.6.2 Data Sekunder.....	52
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.7.1 Observasi (Pengamatan).....	52
3.7.2 Interview (Wawancara).....	53
3.7.3 Dokumentasi.....	53

<b>3.8 Teknik Analisa Data.....</b>	<b>53</b>
<b>3.8.1 Reduksi Data.....</b>	<b>53</b>
<b>3.8.2 Penyajian Data.....</b>	<b>54</b>
<b>3.8.3 Menarik Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1.1 Sejarah Desa Wajomara.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1.2 Pemerintah Desa Wajomara.....</b>	<b>56</b>
<b>4.1.3 Keadaan Geografis Letak, Luas dan Batas Wilayah.....</b>	<b>56</b>
<b>4.1.4 Demografi.....</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Aspek-Aspek Partisipasi Politik Masyarakat.....</b>	<b>60</b>
<b>4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades.....</b>	<b>60</b>
<b>4.2.1.1 Proses Pemberian Suara (Voting).....</b>	<b>60</b>
<b>4.2.1.2 Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pilkades.....</b>	<b>61</b>
<b>4.2.2 Diskusi Politik Masyarakat Dalam Pilkades.....</b>	<b>64</b>
<b>4.2.2.1 Sosialisasi Politik.....</b>	<b>64</b>
<b>4.2.2.2 Kampanye.....</b>	<b>66</b>
<b>4.2.3 Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah Desa.....</b>	<b>69</b>
<b>4.2.3.1 Komunikasi Masyarakat Dengan Pemerintah Desa....</b>	<b>69</b>
<b>4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....</b>	<b>71</b>
<b>4.3.1 Modernisasi.....</b>	<b>72</b>
<b>4.3.1.1 Perubahan Pola Pikir Masyarakat.....</b>	<b>72</b>
<b>4.3.2 Aktor Politik.....</b>	<b>76</b>

4.3.2.1 Prilaku Politik Masyarakat Desa Wajomara.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>79</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRA-LAMPIRAN</b>	

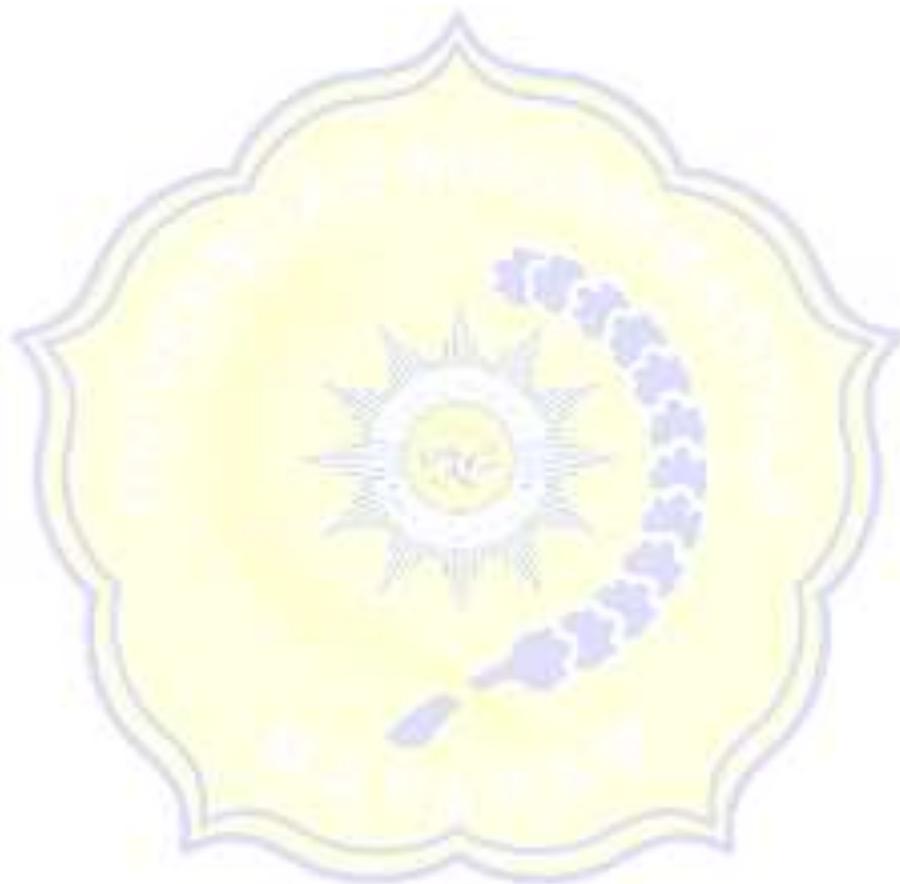


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Telaah Pustaka Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 3.1 Observasi Pengamatan.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perdesun.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Ekonomi.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.6 Hasil Rekapitulasi Akhir Di Tingkat Desa Wajomara Pemilihan Kepala Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan Tahun2021.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 4.7 Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pilkades.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 4.8 Sarana dan Bentuk Sosialisasi Pildes.....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 4.9 Tingkat Keterkaitan Masyarakat Dengan Kampanye Di Pildes Tahun 2021.....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 4.10 Bentuk Komunikasi Masyarakat Wajomara Dengan Pemerintah Desa.....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 4.11 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Wajomara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 4.12 Perilaku Politik Desa Wajomara Pada Pilkades Tahun 2021.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Piramida Partisipasi Politik.....	31
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	46
Gambar Dokumentasi.....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik pada hakikatnya dijadikan sebagai pengukur untuk mengetahui kualitas atau kemampuan warga negaranya, dalam menginterpretasikan seberapa symbol kekuasaan kebijaksanaan untuk mensejahterakan masyarakat sekalian dengan langkah-langkahnya kedalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada khususnya terarah pada dua subyek yaitu: memilih kepemimpinan dan merealisasikan kebijakan pemimpin. Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades itu mungkin bukan asing lagi istilahnya pada saat ini. Sebagai tempat untuk menampung keinginan politik masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk pergantian atau melanjutkan pemerintah desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi kemauan dan harapan masyarakat di desa tersebut, untuk mengajukan calon yang layak dijadikan sebagai kepala desa. Pilkades adalah sebuah instrument pada pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.

Partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau sekelompok orang yang ikut berpartisipasi secara aktif pada kehidupan politik, yaitu dengan menjalankan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan *publyk policy*. Pada kegiatan ini mencakup tindakan atau perbuatan seperti memberikan suara pada pemilihan umum (pemilu), menghadiri atau mengikuti rapat umum, menyediakan hubungan *contacting* dan *lobbying* dengan para pejabat pemerintah atau para anggota

parlemen, agar menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan kemasyarakatan dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut McClosky (2008:368) Partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka melibatkan diri pada proses pemilihan pemimpin, dan secara langsung atau secara tidak langsung, pada proses pembuatan kebijakan umum. Huntington (2004:4) “Partisipasi politik dinegara berkembang” menurut perspektifnya bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang berbuat sebagai individu-individu, yang dimaksud agar untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau langsung, mantap atau sporadis, secara aman atau secara tidak aman, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak belakang dengan paham, bahwa kedaulatan ada di tangan masyarakat yang dilakukan melalui program dalam kebersamaan untuk memutuskan suatu tujuan-tujuan tertentu serta masa depan rakyat itu sendiri dan untuk menentukan oknum-oknum yang akan bisa memegang kekuasaan. Anggota masyarakat yang melibatkan diri pada proses politik, misalnya dalam proses pemberian suara atau dalam kegiatan lainnya lagi, yang terdorong oleh kepercayaan bahwa melalui kegiatan dalam kebersamaan maka kepentingan mereka semuanya akan tersalurkan atau setidaknya diperhatikan dan mereka lumayan akan dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk melakukan kebijakan yang mengikat. Dengan kata lain, bahwa mereka akan percaya program yang di buat oleh mereka itu mempunyai kaitan dengan politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah akan disamakan dengan atura Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan bahwa yang mengatur dan mengurus pemerintah daerah itu sudah menjadi tanggungjawabnya para pemerintah daerah agar bisa mengatur dan mengurus sendiri oleh mereka, kesejahteraan masyarakat itu agar lebih mempercepat untuk terwujud maka harus diarahkan melalui pelayanan, pemerdayaan peningkatan dan partisipasi masyarakat, serta dengan peningkatan dalam daya saing di daerah itu harus memperhatikan juga prinsip berdemokrasi, keseimbangan, keadilan, kejayaan dan kekhususan dalam suatu daerah dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Evisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lagi dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, daya dan keanekaragaman daerah, dalam memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada daerah dan disertai dengan memberikan hak dan kewajiban penyelenggaraan otonmi daerah pada kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara di persaingan global pada saat ini.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintah desa, dalam pasal 33 huruf g, membahas mengenai substansi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala

desa dengan membentuk panitia di kabupaten/kota yang diberikan hak penuh oleh pemerintah kabupaten.

Peraturan yang dibuat pemerintah dalam negeri (PERMENDAGRI), Nomor 65 tahun 2018, membahas tentang perubahan aturan pemilihan kepala desa (PILKADES), menyebutkan beberapa poin yang mengatur dalam pasal untuk jalannya tahapan pemilihan, pada butir pertama yang membuat panitia pemilihan di kabupaten atau kota di buat oleh bupati/walikota yang ditetapkan dalam keputusan bupati/walikota. Kedua, panitia pemilihan kabupaten/kota memiliki tugas pokoknya sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pasal satu (1) meliputi: konsep, mengkoordinasikan, dan melaksanakan dari semua tahapan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu melakukan bimbingan teknis, kotak suara dan jumlah surat suara perlu ditetapkan, hasil pemilihan perlu melakukan laporan atau mengevaluasi, namun kotak suara dan pencetaka surat suara harus memfasilitasikan.

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai bagian-bagian wilayah yang mempunyai wewenang untuk bisa mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan diakui oleh adat istiadat masyarakat setempat dan dihargai dalam sistem pemerintahan NKRI. Aspek politik mencakup prinsip otonomi, sosial, tradisi, ekonomi dan pemerintahan. Maka yang sebagai catatan, prinsip wilayah merdeka ini berada dengan prinsip daerah otonomi. Oleh sebab itu sebagai daerah otonom, desa harus mempunyai berbagai kebebasan untuk mengelola beberapa sumber daya alam yang ditujukan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya, yang berlaku diwilayah kedaulatan Republik Indonesia dalam bentuk bingkai konstitusi.

Dengan demikian di Indonesia , dalam penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang telah berlaku oleh otonomi yang diberikan kepada desa sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, serta aturan-aturan lainnya yang sudah berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya yang meningkat dan membatasi demi tercapainya pembangunan dalam suatu desa. Oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia seyogya telah mengakomodasikan kepentingan di desanya sebagai wujud timbal baliknya pada penyelenggaraan pemerintah nasional agar desa menjadi sebuah ukuran pada kemajuan dalam perekonomiannya untuk rakyat sekitarnya. Sehingga timbullah beberapa bentuk produk kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa, dimana berpatokan pada prinsip desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah desa sebagian besar berkewenangan pada penataan yang diserahkan untuk pemerintah di level kabupaten atau kota. Ketika kita melihat kembali berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemerintah kabupaten atau kota menjadi garda terdepan terhadap kewajiban pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mengubah desa agar menjadi sebuah desa yang lebih baik, makmur, sejahtera dan maju.

Pengertian pemerintah desa yaitu: Sebuah sub sistem pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya itu. Tugasnya kepala desa itu harus bertanggung jawab penuh terhadap kepercayaan yang sudah

di berikan oleh masyarakat untuk mengurus desanya agar menjadi lebih baik serta bisa terwujud aspirasinya bersama rakyat sekitarnya sehingga bisa membuat rakyat hidup lebih nyaman dan tentram. Sebagai kepala desa tugasnya tidak sama dengan presiden, karena seorang kepala desa itu bisa mengenal secara langsung dengan masyarakatnya yang berada di sebuah desa tersebut, akan tetapi presiden hanya bisa interaksi dengan masyarakat luas atau pada umumnya sehingga tidak mengenal secara langsung atau lebih dekat dengan rakyatnya.

Kenyataan hematnya ini menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih memiliki tempat tinggalnya di pedesaan atau di pelosok-pelosok. Oleh sebab itu bisa dikatakan penduduk daerah pedesaan adalah sebuah modal utama terhadap pembangunan nasional, yang dipunyai oleh warga dan bangsa Indonesia. Dengan jumlah penduduk di daerah pedesaan yang begitu banyak, maka harus di didik dengan benar, seperti para tenaga kerja yang lebih efektif terhadap beberapa kegiatan pembangunan di berbagai biang kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, perlu di berikan perhatian yang besar terhadap peningkatan terhadap sebuah pembangunan di daerah pedesaan, yang lebih dominan itu oleh peningkatan prakarsa dan swadaya rakyatnya.

Pada sebuah sistem pemerintahan desa, seorang kepala desa itu yang di pilih secara langsung oleh masyarakatnya di desa tersebut dan seorang calon kepala desa yang sudah memenuhi syarat serta mempunyai suara yang lebih unguui. Di Desa Wajomara sebagian besar masyarakat sudah tau dan sudah mengenal siapa-siapa para calon yang akan bersaing pada pilkades yang sudah direalisasikan disekitar pertengahan bulan Februari tahun 2021.

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan menggunakan wawancara bersama Sekretaris Desa (Sekdes) pada hari / tanggal : Selasa, 9 Maret 2021.

Pada pemilihan kepala desa di periode ini hanya 2 cakades yang akan di coblos oleh masyarakat Wajomara meliputi: Silvester Sape dan Frederikus Apa. Dalam desa wajomara terdiri dari empat (4) dusun meliputi: Wolowajo, Zeta Logo, Lau Baka dan Boamara, dan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 667 jiwa dan pemilih yang sudah terdaftar memiliki 568 jiwa. Desa Wajomara adalah sebuah desa yang memiliki hasil perekonomiannya terbanyak adalah pertanian dan merantau di luar negeri. Di tahun 2021 ini, wasyarakat Wajomara memberikan hak suara dalam pemilihan seorang kepala desa sekaligus memberikan kabar baik buat peneliti untuk adakan penelitian di desa Wajomara.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diwawancara di atas bahwa partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Wajomara itu memang memuaskan karena dengan keterlibatan masyarakat pada pilkades tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan dan juga kesuksesan masyarakat itu karena atas perjuangan para panitia pilkades dan pemerintah desa Wajomara yang memberikan sosialisasi tentang partisipasi politik.

Alasan mengapa penulis memilih judul proposal tentang “*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Tahun 2021*” agar peneliti bisa memahami tentang keterlibatan warga desa pada pilkades di Desa Wajomara tahun 2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam peneliti ini adalah :

1. Bagaimana Keterlibatan Politik warga pada pemilihan Kepala Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, tahun 2021 ?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik warga desa Wajomara pada Pilkades tahun 2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami tentang keterlibatan politik warga pada pemilihan Kepala Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, tahun 2021.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang pengaruh pada keterlibatan warga desa Wajomara pada pilkades tahun 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan informasi yang bersifat ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang behubungan saman judul tulisan ini.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat buat kesuksesan pelaksanaan melewati proses pembangunan politik yang demokrasi melewati pelaksanaan Pemilu pada pemilihan Kepala Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Periode 2016-2021 pada hubungannya dengan keterlibatan politik warga.

### 3. Akademis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan buat seluruh orang yang mau memperluaskan lagi judul yang dibuat oleh penulis.



## BAB II

### TINJAU PUSTAKA

#### 2.1 Telaah Pustaka

Menurut Pawito (2008), maksud pada telaah pustaka yaitu untuk membuat jelajah agar bisa memahami kesamaan perbedaan pada penelitian yang dibuat dengan membandingkan teori dan unit analisis dijadikan fokus penelitian.

Dengan judul penelitian “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wajomara Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021” ini maksudnya agar mengetahui seperti apa keterlibatan warga desa Wajomara pada pilkades yang dilakukan dalam pilkades 2021, serta untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada keterlibatan politik warga desa Wajomara. Dijadikan bahan perbandingan dan penguatan, penulis membuat peninjauan kepada penelitian berlalu yang berhubungan dengan “Keterlibatan Politik”. Ada juga penelitian yang peneliti lakukan sebagai bahan telaah pustaka dan bahan pertimbangan yaitu :

**Penelitian yang dilakukan oleh Adi Satmoko Agus dengan judul penelitiannya “Partisipasi politik masyarakat desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pemeksaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 2013”**

Penelitian ini adalah hasil karya ilmiah yang dibuat oleh Adi Satmoko Agus, yaitu dosen Ppkn, FIS, UNESA. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan variabel merupakan keterlibatan politik. Maksud penelitian ini

merupakan awal untuk memahami tentang partisipasi politik warga desa Lembung dan faktor apa saja yang mendasari tentang tingginya sebuah keterlibatan warga pada pilkades dengan menganalisis bagaimana keadaan budaya masyarakat dan kultur warga desa.

Pada jumlahnya itu, Adi Satmoko Agus memberikan kesimpulan bahwa tingkat keterlibatan warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasaan dalam pilkades dikatakan aktif, karena kepekaan politik dalam pemerintah lumayan tinggi pada pemberian dukungan terhadap pemerintah lewat pilkades demi memajukan desa Lembung dan kemakmuran warga. Penyebab-penyebab yang melatar belakangi warga desa Lembung, Kecamatan Galis karena adanya oknum-oknum sosialisasi politik yang lumayan intens mengsosialisasikan pelaksanaan pilkades itu, warga mau mendapatkan sosok pemimpin yang baik untuk membuat perubahan-perubahan di desanya mereka.

Subjek pada penelitian yang dibuat Adi Satmoko Agus merupakan semua populasi pemilih, tokoh masyarakat, tokoh adat dan oknum-oknum sosialisasi politik yang ada di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasaan. Dalam hal ini penelitian meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wajomara 2021” perbedaannya penelitian dengan peneliti terdahulu ini adalah perilaku politik warga dan objek penelitian.

**Penelitian yang dilakukan oleh Kimbal L Marten dengan judul penelitiannya “Partisipasi politik dalam proses pembangunan desa di kecamatan Wori kabupaten Minahasa Utara”**

Penelitian kedua merupakan jurnal yang ditulis oleh Kimbal L Marten, yaitu dosen Politik Universitas Samaratulangi Manado di tahun 2016. bentuk penelitian ini yaitu kualitatif dan memfokuskan penelitian dalam keterlibatan politik warga pada pembangunan desa di kecamatan Wori. Maksud pada penelitian ini yaitu bisa mendapatkan gambar tentang keterlibatan politik warga pada pembangunan bisa diimplementasikan pada kelembagaan politik desa. Dengan adanya kelembagaan politik desa yang di aplikasikan pada peran BPD sudah memberikan dampak yang sangat positif buat masyarakat desa pada kehidupan demokrasi di desa.

Hasil penelitian memperkuat pada pemahaman kepada pendidikan politik rakyat hanya di mengerti melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkades. Sementara penelitian meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wajomara”. Ketidaksamaan penelitian kedua itu dengan penelitian yang dilakukan penelitian yaitu terpusat penelitian, objek penelitian dan bentuk penelitian.

**Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novianti dengan judul penelitiannya “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang tahun 2013”**

Penelitian ketiga adalah naskah publik yang dibuat oleh Novianti Dwi di tahun 2015. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Pada peneltian ini konsep teori yang dipakai adalah teorinya Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yaiyu ada

beberapa sub variabel pada indikator yang bisa mempengaruhi keterlibatan politik warga yaitu sebagai berikut: Faktor Sosial dan Faktor Politik.

Pada jurnal ini Novianti Dwi, memberikan kesimpulan pada hasil penelitian ini menggambarkan tentang keterlibatan politik warga Malang rapat dalam pilkades 2013 yang sudah berlalu itu sangat rendah dengan penyebabnya oleh faktor ekonomi rakyat sehingga membuat rakyat lebih mengutamakan pekerjaannya mereka ketimbang mengurus masalah politik dan juga faktor politik yang kurangnya pendidikan warga, oleh sebab bisa mempengaruhi pengetahuan warga untuk mengambil bagian pada politik.

Sementara peneliti meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wajomara”. Memiliki perbedaannya di penelitian ketiga itu dengan penelitian yang dilakukan penelitian yaitu terpusat pada penelitian dan tempat penelitian.

**Penelitian yang dilakukan oleh Sholikan Amirotnun dengan judul penelitiannya “Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (*study pada masyarakat desa Kutasari kecamatan Cipari kabupaten Cilacap*)**

Penelitian keempat ini adalah jurnal yang dibuat oleh Sholikan Amirotnun, yaitu dosen tetap jurusan dakwah STAIN Purwokerto. Bentuk penelitian ini yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif, penulisan ini menggunakan fenomena perilaku politik dalam pilkades dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial politik langsung.

Pada jurnal ini Sholikan Amirotnun, memakai metode pengumpulan data dengan berbagai jenis teknik yang dilakukan yaitu: Observasi, wawancara

mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan tentang sikap dan perilaku politik rakyat desa Kutasari pada pilkades yang pada umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka ketimbang faktor intelektual para cakades yang bersangkutan. Faktor-faktor yang menyebabkan sikap dan perilaku rakyat tersebut yaitu: keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan mereka.

Sementara peneliti meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wajomara”. Memiliki perbedaannya penelitian dengan peneliti pertama yaitu metodologi penelitian dan teori yang dipakai dalam tinjauan pustaka.

**Penelitian yang dilakukan oleh Irinto dengan judul penelitiannya “Analisis partisipasi politik pemilih pada pemilihan walikota Belitar dengan pendekatan komunikasi politik dan budaya politik”**

Penelitian kelima ini adalah jurnal yang dibuat oleh Irinto, merupakan penelitian madaya bidang politik dan pemerintah pada balitabang provinsi Jawa Timur. Bentuk dari penelitian yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bermaksud bisa mengidentifikasi faktor yang mengakibatkan keterlibatan politik dan mengetahui efektifitas sosialisasi pada pemilihan walikota Belitar.

Pada penelitian ini Irinto menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan kepada keterlibatan politik ada beberapa hal yaitu : 1.) Faktor budaya politik partisipan, budaya politik partisipan tersebut dipengaruhi oleh karena kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan kota Belitar dipandang baik selama 5 tahun terakhir

terutama di masa pemerintahan Djarot Syaiful Hidayat. 2.) Faktor pelayanan publik yang selama ini memberikan pelayanan publik yang sangat baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 3.) Faktor persepsi masyarakat terhadap kondisi kebebasan politik pada saat ini di Belitar ikut mewarnai partisipasi mereka dalam pemilihan walikota Belitar.

Sementara peneliti meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wajomara”. Memiliki perbedaannya peneliti dengan jurnal kelima ini terletak pada fokus penelitian dan metodologi penelitian.

Selanjutnya untuk mempermudah pembaca dalam memahami telaah pustaka yang dipakai peneliti pada penelitian ini. Berikut ini peneliti akan sajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2.1 Telaah Pustaka Penelitian**

No.	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian
1.	Adi Satmok Agus (2013) Dosen Ppkn, FIS, UNESA.	“Partisipasi politik masyarakat Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pemeksaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 2013”	Dalam jurnal tersebut, Adi Satmoko Agus menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pemeksaan dalam pilkades tergolong aktif, karena kepekaan politik pada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah melalui pilkades untuk memajukan des Lembung dan kemakmuran masyarakat.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang tingkat partisipasi politik masyarakat desa.

			<p>Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Lembung, kecamatan Galis karena adanya agen-agen sosialisasi politik yang sangat intens mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, masyarakat ingin mencari sosok pemimpin demi perubahan-perubahan yang ada di desa tersebut.</p>	
2.	<p>Kimbal L. Marten (2016) Dosen politik Universitas Samaratulangi Manado.</p>	<p>“Partisipasi politik pada proses pembangunan desa di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara”</p>	<p>Hasil penelitian partisipasi politik masyarakat pada pembangunan dapat diimplementasikan dalam kelembagaan politik desa. Kehadiran lembaga politik desa yang diaplikasikan dalam peran BPD telah memberikan dampak yang positif bagi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi di desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat hanya dipahami lewat proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala desa.</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang model partisipasi politik masyarakat desa.</p>
3.	<p>Novianti Dwi (2015)</p>	<p>“Partisipasi politik masyarakat dalam pilkades Malang Rapat,</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa partisipasi politik masyarakat Malang rapat pada pemilihan</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis</p>

		kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan tahun 2013”	kepala desa 2013 yang lalu sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat sehingga membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus masalah politik dan juga faktor politik yang kurang pendidikan masyarakat, maka dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi.	adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi pada penelitian kepala desa.
4.	Sholikah Amiroton. (dosen tetap jurusan dakwah STAIN Purwokerto)	“Perilaku politik masyarakat pada pemilihan kepala desa ( <i>study pada masyarakat desa kutasari kecamatan cipari kabupaten Cilacap</i> )	Hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap dan perilaku politik masyarakat desa Kutasari dalam pemilihan kepala desa umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka ketimbang faktor pengetahuan calon kepala desa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang bersangkutan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut diantaranya adalah keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan mereka.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perilaku politik masyarakat desa.
5.	Iranto (2011), madaya bidang politik dan pemerintahan pada Balitabang	“Analisis partisipasi politik pemilihan dalam pemilihan walikota Belitar dengan pendekatan	Hasil dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik ada beberapa hal antara lain : 1.) Faktor	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

	provinsi Jawa timur.	komunikasi politik dan budaya politik”	budaya politikpartisipan, budaya politik partisipan tersebut disebabkan oleh karena kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan kota Belitar di padang baik selama lima tahun terakhir terutama pada masa pemerintahan Djarot Syaiful Hidayat. 2.) Faktor pelayanan publik yang selama ini memberikan pelayanan publik yang sangat baik dan dapat memberikan kepuasan kepada rakyat. 3.) Faktor persepsi masyarakat terhadap kondisi kebebasan berpolitik pada saat ini di Belitar ikut mewarnai partisipasi mereka pada pemilihan walikota Belitar.	meneliti tentang pendekatan politik dan budaya politik.
--	----------------------	--	--	---

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu berbeda pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Tahun 2021. Mengkaji tentang bagaimana bentuk partisipasi dan alasan masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Wajomara Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021. Partisipasi politik masyarakat merupakan faktor penting pada suatu pengambilan keputusan, sehingga oleh peneliti mengkaji tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Wajomar, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo

Tahun 2021. Sedangkan dipersamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama mengkaji tentang partisipasi politik, akan tetapi pada penelitian ini mengkaji tentang keterlibatan rakyat pada agenda politik.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi menjadi salah satu prinsip dasar dari *goodgovernment*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi pertama pada mengawali reformasi 1998. Partisipasi muncul dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dari *capere* yang artinya mengambil peran dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. Ketika digabungkan dari edua kata itu menjadi “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan.

Jadi partisipasi adalah mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting disuatu demokrasi. Partisipasi politik adalah ciri khas dari modernisasi politik. Ada juga keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dan mempengaruhi warga negara, maka warga Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007:151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh (Cholisin, 2007:150) memberikan defnisi singkat berkaitan dengan partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan warga negara biasa untuk menentukan semua keputusan yang berkaitan atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Mirian Budiarjo, (Cholisin, 2007:150) mengemukakan bahwa partisipasi politik pada umumnya dapat didefinisikan sebagai agenda individu atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif pada kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan spontan atau tidak spontan yang mengakibatkan kebijakan umum. Agenda ini mencakup tentang perbuatan seperti memberikan suara pada pemilu, mengikuti kampanye, menjadi anggota sutau partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Oleh karena itu di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa keterlibatan rakyat lebih tinggi, maka akan lebih bagus pada implementasi banyaknya tingkat keterlibatan untuk menunjukkan bahwa warga negara nuruti dan mengeri tentang persoalan politik dan mau berpartisipasi pada agenda-agenda tersebut. Sebaliknya tingkat keterlibatan yang kurang pada umumnya dianggap sebagai kode yang kurang bagus, karena bisa ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian kepada masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008:369).

Para elit yang lain juga mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik:

Keith Fauis, (2000:133) mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari

seseorang atau kelompok orang ke pada proses pemerintahan. Keikutsertaan ini mencakup keterlibatan pada proses memberi keputusan atau berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Herbert McClosky (2005:252) mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari partisipasi politik sebagai agenda-agenda suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka melibatkan diri pada proses pemilihan penguasa dan secara spontan atau tidak spontan pada proses pembuatan kebijakan umum.

Huntington dan Nelson (2000:3) Partisipasi politik sebagai agenda warga Negara yang berbuat sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, bagus atau secara aman atau anarkis, legal atau ilegal, normal atau tidak normal.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para elit di atas dapat kita simpulkan bahwa partisipasi politik merupakan hal-hal yang masih mengikat dengan agenda seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan, yang dilakukan secara spontan atau tidak spontan dengan cara konvensional ataupun dengan cara nonkonvensional atau bahkan dengan anarkis (*violence*).

### 2.2.2 Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan tentu dipelopori oleh berbagai faktor. Hamlan Surbakti (2008:140) berpendapat bahwa ada dua *variable* penting yang mengakibatkan banyak kurangnya tingk keterlibatan politik seseorang. Pertama, aspek kepekaan politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud pada kepekaan politik merupakan kepekaan hak dan kewajiban rakyat. Contohnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban masyarakat dan lain-lain. Kedua, mengenai bagaimana penilaian serta pujian kepada keputusan pemerintah dan eksekutornya pemerintah.

Sementara itu masih ada faktor yang independen (*variable independen*). Artinya bahwa kurangnya kedua faktor itu diakibatkan oleh faktor-faktor lain, seperti status masyarakat, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status masyarakat yaitu kedudukan seseorang beepatan pada kekeluargaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi status ekonomi yaitu kedudukan seseorang pada bergagai rakyat, beepatan pada pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang banyak diperkirakan tidak hanya mempunyai ilmu politik, akan tetapi memiliki kemauan serta memfokuskan pada politik dan keyakinan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145)

Yang berikutnya lagi Myron Weimer mengemukakan pendapatnya bahwa keterlibatan politik diakibatkan oleh berbagai hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas`oed dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

1.) Modernisasi

Modernisasi diberbagai bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industry, meningkatkan arus perpindahan penduduk, peningkatan kualitas baca tulis, memperbaiki pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2.) Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Terjadinya perubahan kelas pada struktur kelas baru itu sebagai konsekuensi dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas di era indusrtialisasi dan modernisasi.

3.) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modernisasi

pemikiran-pemikiran cemerlang seperti nasionalisme, liberalisme, konekuensinya untutan-tuntutan untuk keterlibatan pada pengambilan suara.

4.) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai tujuannya dibuat dengan cara mencari dukungan masyarakat yang banyak.

5.) Keterlibatan pemerintah yang sekian luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya.

Meluasnya ruang lingkup aktivis para pemimpin ini biasanya menarik perhatian sehingga timbulah tuntutan-tuntutan organisasi untuk melibatkan diri yang dipelopori dengan pembuatan kebijakan politik.

Selain itu hematnya Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (2000:168) memberikan alasan bermacam-macam mengenai keterlibatan individu yaitu :

1. Berkenaan dengan menarik perhatian politik yang diberikan. Milbrath mengemukakan pendapatnya tentang kejujuran dan kepedulian dari individu untuk menarik perhatian politik lewat kontak-kontak individu, kelompok dan lewat media massa akan mendapatkan penyebab bagi keterlibatan seseorang pada agenda politik.
2. Berkenaan dengan karakteristik oknum masyarakat. Bisa dikatakan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin dan kepercayaan (agama). Karakter individu berpatokan pada faktor-faktor tersebut mempunyai efek yang relatif lumayan banyak terhadap keterlibatan politik.
3. Yaitu meningkatkan sifat dan sistem partai dimana seseorang itu hidup. Individu yang semangat di Negara yang demokrasi, partai-partai politiknya cenderung mencari support dari masyarakat pada umumnya dan memperjuangkan kebutuhan banyak orang, sehingga oknum-oknum masyarakat cenderung keikutsertaan dalam politik.
4. Yaitu adanya ketidaksamaan regional. Ketidaksamaan ini adalah aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap ketidaksamaan watak dan perilaku seseorang. Dengan ketidaksamaan regional itu juga yang mensupport ketidaksamaan tingka laku politik dan keterlibatan politik.

Keterlibatan pemilih pemula pada pilbup spontan memang erat kaitannya dengan aspek-aspek yang mempeloporinya. Ada pertimbangan-pertimbangannya di saat mekakai hak pilihnya. Dapat dilihat dari bentuk visi-misinya kandidat yang lebih layak walaupun tidak ada kepastian sesudah kandidat terpilih. Ada juga berupa acuan yang dipakai untuk memilih yaitu mereka kandidat yang menerapkan money politik dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Dalam tingka laku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam keterlibatan akan tetapi aktif serta mempunyai hak untuk bebas.

### **2.2.3 Tipologi Partisipasi Politik**

A.Rahman H.I (2007:288) mengemukakan bahwa pada umumnya tipologi partisipasi sebagai agenda namum dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif yaitu: Partisipasi yang berorientasi dalam proses input dan output.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif yaitu: Partisipasi yang berorientasi kepada output, yang merupakan menunggu kostitusi pemerintah, menerima mengikuti saja semua kebijakan pemerintah.

### 3. Golongan Putih (Golput) atau Kelompok Apatis

Golongan putih atau kelompok apatis, mereka menganggap sistem politik yang mempunyai efek sampingnya dari yang dicita citakan.

Cholisin (2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

#### 1. Partisipasi Politik Apatis

Oknum yang tidak melibatkan diri dan mengundurkan diri dari proses politik.

#### 2. Partisipasi Politik Spector

Oknum yang sekurang-kurangnya pernah ikut memilih di pemilu.

#### 3. Partisipasi Politik Gladiator

Oknum-oknum yang secara aktif berpartisipasi di proses politik, yaitu: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis warga.

#### 4. Partisipasi Politik Pengkritik

Oknum-oknum yang melibatkan diri pada bentuk yang tidak konvensional.

Menurut penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa orientasi keterlibatan politik aktif tertuju ke input dan output politik. Sementara itu keterlibatan pasif tertuju pada outputnya saja. Sementara itu juga ada pemikiran warga di sistem politik yang ada dinilai mempunyai efek samping dari aspirasinya sehingga lebih merujuk ke keterlibatan politik yang apatis.

Pemberian suara pada pemilihan kepala desa adalah salah satu tercapainya keterlibatan pada politik yang terbiasa. Agenda ini meskipun hanya pemberian suara, sementara itu juga berkaitan dengan semboyan yang diterapkan di kampanye, bekerja untuk membantu pemilihan, membantu tempat mengumpulkan suara dan sebagainya.

Sementara itu pendapat Olsen yang dikutip oleh A. Rahman H.I (2007:289) melihat keterlibatan sebagai dimensi pertama stratifikasi sosial. Ia memilahkan keterlibatan menjadi 6 bagian yaitu: pemimpin politik, komunikator (Oknum yang mendapatkan dan memberikan pendapat, sikap dan informasi lainnya untuk orang lain), warga masyarakat, organisasi marginal (Oknum-oknum yang sangat kurang melakukan kontak dengan sistem politik).

Keterlibatan politik juga bisa digolongkan berdasarkan jumlah pelaku yaitu: individual dan kolektif. Individual merupakan seseorang yang membuat surat yang tertuju pada tuntutan atau keluhan terhadap pemerintah. Sedangkan maksud dari keterlibatan kolektif adalah agenda warga negara secara bersama untuk memelopori penguasa seperti agenda di proses pemilu.

Keterlibatan kolektif dibagi menjadi 2 yaitu keterlibatan kolektif yang konvensional contohnya seperti melaksanakan agenda di proses pemilu dan keterlibatan politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti permasalahan yang tidak benar, melakukan turut rame, menguasai bangunan umum. Keterlibatan politik kolektif agresif bisa dibagi menjadi 2 yaitu aksi agresif yang keras dan aksi agresif lembut. Sebuah aksi agresif dinyatakan kuat dipandang dari 3 ukuran yaitu bersifat anti rezim (Melanggar peraturan yang berkaitan dengan

aturan keterlibatan politik normal), mempengaruhi tuganya pemerintah dan merupakan agenda organisasi yang dibuat oleh monelit. Sementara itu keterlibatan politik kolektif agresif yang lembut ialah yang tidak mencapai dari ke 3 persyarat diatas itu.

Di Negara-negara berkembang keterlibatan politik cenderung dimobilisasi secara umum dan ditujukan pada kepentingan pembangunan. Oknum-oknum yang melaksanakan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya ialah tercapainya keinginan dan keterlibatan politik yang gampang serta menarik perhatian dari berbagai kalangan.

#### **2.2.4 Bentuk Partisipasi Politik**

Cholisin (2007:153) mengfokuskan pada banyak kurangnya kepekaan politik dan keyakinan pemerintah (sistem politik dibagi menjadi 4 jenis yaitu: keterlibatan aktif, keterlibatan pasif tertekan (apatis), keterlibatan militant radikal, keterlibatan pasif).

Keterlibatan aktif ialah apabila oknum mempunyai kepekaan politik dan meyakinkan terhadap pemerintah atas. Sebaliknya, apabila kepekaan politik dan keyakinan pemerintah kurang maka keterlibatan politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Keterlibatan militant radikal ada apabila kepekaan politik atas tetapi keyakinan kepada pemerintah sangat kurang. Namun apabila kepekaan politik sangat kurang tetapi keyakinan kepada pemerintah sangat banyak maka keterlibatan ini dikatakan tidak aktif (pasif)

Berbagai jenis-jenis keterlibatan politik yang dirasakan diberbagai Negara bisa dipilahkan ke agenda politik yang berjenis konvensional dan

nonkonvensional yang tergolong mungkin legal (petisi) ataupun ilegal (cara anarkis atau revolution). Jenis-jenis dan frekuensi keterlibatan politik bisa digunakan untuk menilai kenormalan sistem politik, integritas kesemangatan politik, terwujud cita-citanya atau kekurangan hati warga negara.

Jenis-jenis keterlibatan politik menurut hematnya Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas`oed (2011:57-58) yang dipilahkan menjadi 2 jenis yaitu: keterlibatan politik konvensional dan keterlibatan politik nonkonvensional. Ada beberapa jenis rinciannya yaitu:

1. Keterlibatan Politik Konvensional.

- a. Pemberian suara atau voting.
- b. Diskusi politik.
- c. Kegiatan kampanye.
- d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
- e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative.

2. Keterlibatan Politik Nonkonvensional

- a. Pengajuan petisi
- b. Berdemonstrasi.
- c. Konfrontasi.
- d. Mogok.

Berikutnya lagi David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A. Rahman H.I (2007:286) Jenis keterlibatan warga Negara berpatokan intensitasnya. Intensitas di ke-3 politik dijenjangkan maka akan dibentuk piramida partisipasi politik.

## Piramida Partisipasi Politik



(David F. Rohl dan Frank L. Wilson, 1976. *The Comparative Study of Politise*)

Gambar 1: Piramida partisipasi politik Sumber : A Rahman H.I 2007.

Grup paling bawah dalam gambar piramida keterlibatan politik yaitu: grup yang sama sekali tidak berpartisipasi dan tidak membuat agenda politik. Oleh Roht dan Wilson (A Rahman H.I, 2007:287) dikatakan sebagai gerup apolitis. Grup yang berada diatas apolitis pengamat, grup ini biasanya mengikuti rapat umum partai politik, membahas politik, menyesuaikan perkembangan lewat media, memberikan suara di pemilihan umum.

Berikutnya lagi satu tingkat diatas grup pengamat adalah grup keterlibatan. Dari grup ini aktivitas yang sering dibuat seperti menjadi tugas kampanye, anggota aktif partai, dan grup kepentingan di proyek masyarakat. Selanjutnya grup yang paling diatas ditingkat piramida yaitu: kelompok aktivis. Masyarakat

yang tergolong di grup ini tergabung tidak banyak jumlahnya, mereka adalah pejabat partai full waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Ada juga jenis keterlibatan yang dibuat oleh orang muda yaitu sejenis demonstrasi, pemogokan dan agenda protes. Cara yang sering dibuat oleh pemilih pemula untuk taati melibatkan diri di pemilihan kepala desa ialah bergabung dengan salah satu grup kepentingan di desa menaati agenda kampanye, serta mengikuti diskusi politik di desa.

Bentuk pertama yang dipakai pemilih pemula ialah latar belakang tingkat keterlibatan pemilih merupakan pendidikan dan jenis kelamin. Seluruh komunitas warga mempunyai latar belakang yang tidak sama. Hal tersebut akan memiliki efek kepada tingkat keterlibatan politik di pemilihan kepala desa. Serta menjadi bagian keterlibatan di dinamika agenda politik.

#### **2.2.5 Partisipasi Politik Konvensional**

Gabriel A.Almo (2011:57-70) Keterlibatan politik konvensional merupakan macam-macam keterlibatan yang umum dan lazim didapatkan. Ada juga rincian jenis keterlibatan politik konvensional yaitu:

1. Pemberian Suara

Proses pemberian suara disebut keterlibatan politik di sistem demokrasi sudah menjadi kebiasaan yang sering dipakai, sebagai tolak ukur ikut andilnya warga di semua kebijakan politik disebut negara.

## 2. Diskusi Politik

Pada sebuah negara demokrasi, diskusi politik sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi di kalangan politikus hingga di tingkat warga desa, untuk menyikapi suatu keputusan politik pemerintah ataupun menukar pikiran fenomena-fenomena yang terjadi di ruang publik yang berkaitan dengan politik.

## 3. Kegiatan Kampanye

Proses kampanye di semua pemilihan umum sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi dan dimuat di aturan penyelenggara pemilihan umum baik pemilihan ditingkat pusat hingga pemilihan di tingkat pedesaan.

## 4. Bergabung Dengan Kelompok Kepentingan

Masyarakat yang berpartisipasi membuat dan bergabung di organisasi kepentingan tersebut. Kepentingan yang difokuskan di hal ini bisa saja kepentingan akan politik atau kepentingan lainnya yang fundamental mendatangkan sisi positif atau berguna bagi dirinya dan bagi kelompoknya. Tetapi seperti yang sudah dipaparkan di atas, tentunya grup kepentingan ini juga harus bisa dipakai secara umum oleh warga dan taat terhadap konstitusi negara yang berkaitan dengan peraturan negara.

## 5. Bergabung Dengan Partai Politik

Melibatkan diri dengan partai politik merupakan hal yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh seseorang yang pingin menjadi seorang

pemimpin karena partai politik, salah satu komponen terpakai di sistem demokrasi dan dipakai sebagai mobilitas politik untuk terwujud aspirasinya.

#### 6. Komunikasi Individu Dengan Pejabat Politik Atau Administratif

Komunikasi individu dengan administratif. Hal seperti ini sah-sah saja dilakukan asalkan tidak melanggar aturan yang ada dan asalkan komunikasi tersebut dianggap bisa diterima secara umum.

### **2.2.6 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)**

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan spirit untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Unang Sunardjo, 2004: 197).

Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa, hal ini sudah dipakai dari zaman penjajahan Belanda sampai saat sekarang ini. Bentuk pilkades yang paling tidak rumit di zaman penjajahan Belanda ialah dengan strategi masing-masing pemilih dan pendukung cakades melakukan barisan adu terbanyak ditanah lapangan, sehingga menimbulkan pendukung utama yang namanya GATIP/sapaannya, yang pada zaman sekarang dikenal dengan tim sukses dari masing-masing kandidat kepala desa. Cakades terpilih ialah yang barisan pemilih/pendukungnya sangat banyak. Bentuk pemilihan seperti ini mudah sekali

adanya konflik terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon yang lainnya.

Pada perkembangan berikutnya untuk mengurangi adanya konflik terbuka antara pendukung maka bentuk pilkades dibuat dengan pemilihan langsung yang tidak kelihatan. Pengumpulan suara dibuat dengan memakai lidi“(bahasa jawa=biting)”yang dibuat tanda tersendiri oleh panitia namun dimasukan di dalam “bumbung” yang disimpan di dalam bilik yang tidak kelihatan. Bumbung merupakan sepotong batang bambu yang dibuat lubang untuk menyimpan lidi. Jumlah “bumbung” disesuaikan dengan banyaknya kandidat yang ada. Di setiap bumbung di beri tanda dengan simbol sejenis hasil bumi atau palawija. Contohnya cakades si “A” memakai simbol “jagung”, maka calon si “B” memakai simbol “padi” dan selanjutnya juga begitu. Semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya diberi satu “biting”/lidi dan dibawa masuk ke dalam bilik yang tidak kelihatan. Di dalam bilik pemilih akan kasih masuk lidi ke dalam “bumbung” sesuai dengan orang yang akan dipilihnya, contohnya pilih si A maka pemilih akan kasih masuk lidi ke dalam “bumbung” bergambar jagung.

Hasil pengumpulan suara dihitung berdasarkan banyaknya lidi di setiap “bumbung” tadi Ketika terdapat calon tunggal maka ada 2 bumbung didalam bilik pengumpulan suara yaitu: bumbung dengan simbol cakades yang ada dan satu bumbung lagi tidak di beri simbol apapun yang dikatakan “bumbung kosong” Apabila hasil penghitungan lidi dari bumbung kosong jumlahnya lebih tinggi berarti calon tunggal tadi kalah dengan bumbung kosong dan dia dinyatakan tidak terpilih.

Periode selanjutnya sesudah indonesia merdeka pilkades telah merasakan peningkatan yaitu: dengan memakai pemilihan yang tidak kelihatan di bilik suara dengan memakai kartu suara. Karena pada waktu itu tidak banyak masyarakat yang bisa membaca alias masih banyak masyarakat yang tidak tau huruf, maka kartu suara tidak menuliskan nama akan tetapi memakai gambar hasil bumi atau palawija. Sama halnya seperti pada model sebelumnya gambar yang dipakai ialah gambar hasil.bumi/palawija. Pemilih yang memakai hak pilihnya diberi sebuah lembar kartu suara setelah itu membawanya ke dalam bilik yang tidak kelihatan dan menusuk gambar salah satu calon yang akan dipilihnya. Hasil rekapitulasi suara, calon yang mendapat suara tertinggi itulah yang terpilih sebagai kepala desa.

Di zaman reformasi sekarang ini, model pilkades mengalami peningkatan yaitu: memakai kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilihan dalam memakai hak pilihnya harus menusuk.gambar/foto.calon yang dipilinya. Hasil rekapitulasi suara masih menggunakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu: calon yang mempunyai suara tertinggi itulah pemenangnya (Ramlan Subakti).

Martin Harrop dan William Miller mengemukakan berpendapatnya bahwa pendekatan perilaku pemilih di ilmu politik dibagi menjadi 3 garis besar pendekatan/bentuk. *Pertama*, pendekatan yang sangat psikologis yang disebut identifikasi partai (*partay identification*). *Kedua*, pendekatan yang menganggap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan-pilihannya (*rational choice*). Pemilih dianggap memahami, mengapa ia memilih, apa dampak dari pilihannya itu dan ia sadar betul pilihan yang diambil merupakan instrumen

bermanfaat terhadap artikulasi kepentingan politiknya. Namun pendekatan yang *ketiga*, adalah pendekatan secara sosiologos (*sociological approach*). Pendekatan ini memandang pentingnya basis sosial dalam menentukan perilaku memilih. Misalkan, identitas sosial seperti agama, kelas sosial dan suku bangsa menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai atau seorang kandidat. (Budi Suryadi, 2007: 146).

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan warga berfundamental pada hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya warga dan merealisasikan bentuk-bentuk dari sebuah masalah pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Maka untuk kebutuhan pengurusan rakyat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memimpin jalannya Pemerintah Desa.

Kepala desa adalah komponen penting yang harus ada di suatu sistem pemerintah desa selain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa adalah pimpinan teratas di suatu desa yang dipilih langsung oleh warga desa. Kepala desa memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “Kepala Desa merupakan komponen penyelenggara pemerintah desa yang dililih langsung oleh warga desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa”.

Sutardjo Kartohadikusumo (1993), mengemukakan pendapatnya bahwa secara administratif desa diartikan sebagai sebuah kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Widjaja Haw di bukunya *pemerintah desa/marga*, (2003) Desa atau sapaannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli berfundamental pada hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945.

Daeng Sudirwo (1991) di bukunya yang berjudul *pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintah desa*, Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati oleh sejumlah warga sebagai kesatuan masyarakat tergolong di dalamnya kesatuan masyarakat huku yang mempunyai kelompok pemerintahan terbawah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatua Republik Indonesia.

Menurut Duto Sosialismanto di bukunya yang berjudul *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, yang dimaksud dengan: *Pilkades* merupakan acara rakyat, dimana *pilkades* bisa diartikan sebagai sebuah kesempatan untuk menampilkan oknum-oknum yang bisa melindungi kepentingan warga desa (Sosialismanto, 2001:191) Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh warga desa dari calon yang telah memenuhi persyaratan, *pilkades* bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Pilkades* juga direalisasikan lewat tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Berdasarkan hematnya di atas yang dimaksud dengan *pilkades* ialah peta masyarakat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat melindungi warga desa. *Pilkades* harus memenuhi persyaratan-persyarat yang berkaitan dengan *pilkades*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, berikutnya lagi disebut desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya, Hanif Nurcholis (2011).

Pemilihan Kepala Desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut

jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang hakikatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan Kepala Desa.

Siswanto (2010:14) menguraikan pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.

#### **2.2.7 Syarat-syarat Yang Dapat Dipilih Menjadi Kepala Desa**

Untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dalam hal ini Perda Kab. Nagekeo Nomor 6 Tahun 2012 dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memiliki beberapa kesamaan. Di antara yang dijelaskan dalam Perda Kab. Nagekeo Nomor 6 Tahun 2012 pasal 10 bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi persyaratan:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemerintah.
3. Terdaftar sebagai penduduk setempat..
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau Sederaja.

5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berkelakuan baik.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
9. Tidak cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Sanggup tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pilkades.
11. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatannya.
12. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya.
13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa Diakui dan dihormati ada sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya pemilihan kepala desa juga diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan dalam pasal 33 bahwa persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:

1. Warga negara republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
7. Teraftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar.
8. Sedang tidak menjalani hukum pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berdinas sehat.
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama tiga kali jabatan.
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

### **2.2.8 Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

BAB III pelaksanaan pilkades dilaksanakan melewati tahapan/mekanisme meliputi:

#### **1. Persiapan**

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. Pemberitahuan kepada BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. Pembentukan panitia pilkades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Laporan akhir masa jabatan kepada kades bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan.
- d. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

#### **2. Penetapan Pemilih**

Penetapan pemilihan sebagai dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas:

- a. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

b. Pemilihan harus memenuhi syarat: penduduk desa yang ada pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang lama memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilihan ementara yang dibuktikan dengan “Kartu Tanda Penduduk” atau surat keterangan penduduk.

### 3. Pencalonan/Pendaftaran Calon

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan bhineka tunggal ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.

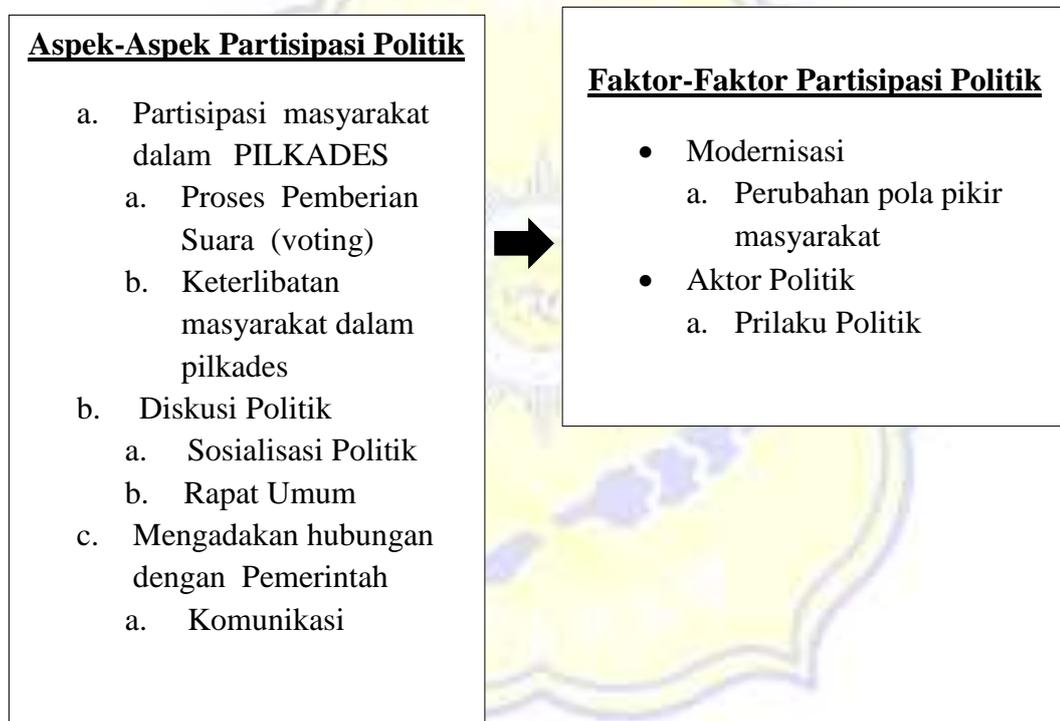
### 4. Penelitian Calon Penetapan dan Pengumuman.

- a. Panitia pemilihan membuat penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  - b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
  - c. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
  - d. Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindak lanjut panitia pemilihan.
5. Kampanye
- a. Cakades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
  - b. Pelaksanaan kampanye 3 hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - c. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
6. Pemungutan dan Perhitungan Suara
- a. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
  - b. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
7. Penetapan

- a. Panitia pilkades memiliki laporan hasil pilkades kepada BPD..
- b. BPD berdasarkan laporan hasil pilkades menyampaikan cakades terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati/walikota melewati camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- c. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepada desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

### 2.3 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian**



### 2.3.1 Definisi.Konseptual

Definisi dari konseptual adalah batasan terhadap konflik-konflik variabel yang peneliti jadikan pedoman di penelitian untuk dipergampangkan dalam mengoperasionalkan penelitian pada waktu membuat penelitian di lokasi. Selain itu definisi konseptual merupakan sebuah definisi yang masih berupa konsep dan isinya masih sangat abstrak meskipun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk mengerti dan dipergampang dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang akan dipakai dalam penelitian ini serta sesuai dengan kerangka teori penelitian. Maka beberapa definisi konseptual yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain:

#### a. Partisipasi Politik

Keterlibatan politik merupakan agenda individu ataupun organisasi orang untuk ikut serta secara aktif di kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara dan terlibat dalam kebijakan pemerintah. Masyarakat yang membuat keterlibatan politik didasari asumsi bahwa kepentingan dan kebutuhannya akan tersalurkan atau setidaknya dapat diperhatikan.

#### b. Tipologi Partisipasi Politik

Secara garis besar tipologi keterlibatan politik dibedakan menjadi, Keterlibatan aktif yaitu keterlibatan yang berorientasi pada proses input dan output. Keterlibatan pasif, yaitu keterlibatan yang berorientasi hanya pada output, dalam artinya menanti peraturan pemerintah, menerima melaksanakan

saja seluruh kebijakan pemerintah. Golongan putih (golput) atau grup apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

c. Partisipasi Politik konvensional

Keterlibatan politik konvensional merupakan jenis-jenis keterlibatan yang umum dan lazim ditemui, seperti pemberian suara, melibatkan diri dengan organisasi yang mempunyai kepentingan, melibatkan diri dengan partai politik, dan komunikasi dengan pejabat politik atau administrasi.

### 2.3.2 Definisi Operasional

Pengertian operasional merupakan komponen penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Pengertian operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu pengertian operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau bisa memandang pengertian operasional suatu penelitian maka seseorang peneliti akan bisa memahami suatu variabel yang akan diteliti.

Adapun pengertian operasional pada penelitian ini yang berdasarkan kerangka berpikir penelitian yaitu:

#### A. Aspek-Aspek Partisipasi Politik

1. Partisipasi masyarakat dalam PILKADES”
  - Proses Pemberian Suara (voting).
  - Keterlibatan masyarakat dalam proses PILKADES.

2. Diskusi Politik

- Sosialisasi Politik.
- Rapat Umum.

3. Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah

- Komunikasi.

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

1. Modernisasi

- Perubahan pola pikir masyarakat.
- Pendidikan (kaum intelektual).
- Kesadaran dan Kepekaan Politik masyarakat.

2. Aktor Politik

- Perilaku politik.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Secara umum metodologi penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berpikir yang bisa dipakai oleh peneliti untuk mengetahui jawaban atas pernyataan-pernyataan di sebuah penelitian, yang meliputi cara memandang dan prinsip berpikir mengenai gejala yang diteliti, pendekatan yang dipakai, prosedur ilmiah (metode yang akan ditempuh), termasuk di mengumpulkan data, analisis data dan penarikan kesimpulan (Pawito, 2008). Selanjutnya metode penelitian yang akan peneliti pakai saat membuat penelitian:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata spontan ataupun tidak spontan dan perilaku yang bisa diamati dari oknum-oknum yang diteliti dengan menjelaskan secara detail tentang konflik yang berkaitan dengan teori dan data yang ada, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan (Pawito, 2008).

Konflik pada penelitian ini ialah untuk mengetahui secara detail tentang keterlibatan politik warga desa Wajomara di pilkades Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo tahun 2021, serta untuk mengetahui apa penyebab-penyebab yang mengakibatkan tinggi rendahnya keterlibatan warga Wajomara di pilkades Wajomara tahun 2021.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipakai oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian adalah Kabupaten Nagekeo namun difokuskan di Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini karena berkaitan dengan judul yang di buat oleh peneliti, serta peneliti juga melihat dari akses waktu, biaya dan desa Wajomara itu sendiri mudah dicapai oleh peneliti.

Hari / tanggal(penelitian): Selasa, 9 Maret 2021.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Agar peneliti lebih terarah maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis buat oleh sebab itu peneliti ingin mengfokuskan untuk mengamati dan meneliti bagaimana keterlibatan politik warga desa Wajomara di pilkades tahun 2021, serta apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik warga desa Wajomara di pilkades tahun 2021.

### **3.4 Metode dan Dasar Penelitian**

Metode peneliti yang dipakai merupakan peneliti deskriptif. Peneliti deskriptif dibuat untuk membuat gambaran yang lebih detail mengenai sebuah konflik, kronologi yang diteliti, mengidentifikasi dan memberikan pemahaman tentang data yang ada secara sistematis. Jenis deskriptif berfundamental pada peristiwa yang terjadi pada waktu peneliti sedang melakukan penelitian di tempat tersebut. Selanjutnya menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan berikutnya lagi menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang dipakai di penelitian ini merupakan wawancara kepada narasumber atau informen yang berisi pernyataan yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Pada peneliti ini yang dikaji merupakan bagaimana keterlibatan politik warga desa Wajomara dan faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan keterlibatan politik warga desa Wajomara di pilkades Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan tahun 2021.

### **3.5 Teknik Penentuan Informen**

Penentuan informen dalam penelitian ini digunakan dengan teknik Purposive Sampling, dimana penelitian digunakan dengan kriteria yang sudah dibuat ditetapkan berdasarkan maksud dari penelitian (Hamid Patilama, 2013). Selain itu informen penelitian merupakan oknum yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Hamid Patilama, 2013). Selain itu informen penelitian merupakan oknum-oknum yang benar-benar mengerti tentang kronologi penelitian yang ingin diteliti.

### **3.6 Sumber Data**

Pada penelitian ini, peneliti memakai 2 sumber data agar hasil data penelitian maksimal. Data yang peneliti pakai yaitu: bentuk data primer dan data sekunder.

#### **3.6.1 Data Primer**

Data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang disampaikan secara spontan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat diyakini, yakni subjek penelitian atau informen yang berkaitan dengan

variabel yang diteliti atau data yang dimiliki dari perspondeng secara langsung (Arikunto, 2008). Pada penelitian ini subjek dan informen yang dipilih sebagai sumber data primer yaitu, yang berkaitan dengan objek penelitian keterlibatan warga di pemilu Kades Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, yang terdiri dari organisasi penyelenggara pengumpulan suara, rakyat yang memiliki hak pilih.

### **3.6.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer (Arikunto, 2008). Pada penelitian ini, diperoleh dari hasil observasi yang dilaksanakan oleh penulis serta dari hasil dokumentasi. Sehingga bisa dikatakan data sekunder ini muncul dari dokumen-dokumen, undang-undang, arsip dan data lain yang dibutuhkan penelitian untuk menambah data penelitian.

## **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategi di penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian ialah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2014:62) Teknik pengumpulan data dan dilakukan menggunakan :

### **3.7.1 Observasi Pengamatan**

Nasution mengemukakan pendapatnya bahwa, observasi merupakan fundasi dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan

data yaitu: fakta mengenai dunia kenyataan yang dimiliki melewati observasi. (Sugiyono, 2014:64).

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti akan mendeskripsikan rencana yang akan diwawancarai dalam bentuk tabel yaitu :

No.	Nama	Jabatan
1.	Fransiskus Dapa	Sekdes
2.	Hubertus Kota, S.Pd	Ketua Panitia Pilkades
3.	Petronela Bhibi	Tokoh Masyarakat
4.	Gaspar Lawa	Tokoh masyarakat
5.	Ernesta Mango	Ketua PKK

### **3.7.2 Interview (Wawancara)**

Wawancara dipakai sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin membuat studi pendahuluan untuk mendapatkan konflik yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti mau mengetahui hal-hal dari responden yang lebih terperinci. (Sugiyono,-2014:72).

### **3.7.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah ringkasan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ialah penggenap dari pemakaian metode observasi dan wawancara di penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2014:82).

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Teknik pengelolaan data pada penelitian kualitatif ini menurut Miles dan Hubermn menggunakan :

### **3.8.1 Reduksi Data**

Data yang dimiliki dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu ditulis secara teliti dan detail. Data perlu diolah memakai reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Mengfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 2014:92).

### **3.8.2 Penyajian Data**

Pada penelitian kualitatif penyajian data ini bisa digunakan pada bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisir, tersusun pada pola hubungan, sehingga akan semakin mempermudah agar bisa dipahami. (Sugiyono, 2014:95).

### **3.8.3 Menarik Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ialah temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Temuan dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti atau tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, bisa berbentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.